

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang ada dan paling banyak digunakan pada saat ini di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Secara sederhana demokrasi memberi penjaminan hak-hak sosial politik yang dimiliki masyarakat sebagai warga negara. Pemilihan umum atau pemerintahan berasal dari keputusan rakyat merupakan hal esensial yang dijamin dalam pelaksanaan demokrasi dan menjadi pembeda dalam sistem-sistem lainnya. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Secara etimologis demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos* yang berarti rakyat dan kekuasaan. Berarti demokrasi secara sederhana memiliki arti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi merupakan sistem yang memberi kekuasaan pada rakyat untuk menentukan nasib dan arah negara melalui pemilihan umum dengan basis bebas dan adil, dan hak tersebut absolut untuk dimiliki setiap warga negara.

Partisipasi politik warga negara menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiyono, 2016). Berarti warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut dalam penentuan kebijakan secara langsung untuk menentukan pemimpin daerahnya, atau negara ataupun secara tidak langsung dengan melakukan pemilihan wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen. Di negara demokrasi seperti Indonesia partisipasi warga negara sangat penting karena salah satunya adalah berguna sebagai alat ukur legitimasi kekuasaan yang berlangsung pada saat itu, semakin tinggi partisipasinya semakin legit dan kuat juga kedudukan pemerintah. Partisipasi masyarakat yang rendah bisa berbahaya dalam perpolitikan sebuah negara atau wilayah tertentu, karena pemerintah tidak punya kekuatan di masyarakat yang

cukup untuk mendukung kinerjanya, selain itu juga bisa berpotensi memunculkan pemimpin yang hanya bekerja untuk kelompok tertentu atau kebutuhan partainya saja.

Ruang warga negara untuk memiliki ikut serta dalam penentuan pemimpin atau ikut serta dalam perumusan kebijakan secara bebas dan terbuka merupakan barang baru dalam iklim politik di Indonesia, karena sebelumnya Indonesia sendiri berada dalam dua fase otoritarian, yaitu orde lama dan orde baru. Setelah 1998, peristiwa reformasi, mulailah perubahan sistem politik yang lebih demokratis yang melibatkan masyarakat secara utuh. Terjadi perubahan mendasar dalam sistem politik, salah satunya adalah mengenai pemilihan umum baik dari ranah pusat sampai ke ranah kedaerahan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih secara adil dan bebas sesuai dengan aturan konstitusi. Namun, perubahan itu juga melahirkan berbagai masalah yang banyak terjadi di wilayah-wilayah. Masalah yang sebetulnya merupakan anasir dari rezim-rezim terdahulunya, elite-elite lokal yang terus-terusan bertengger dalam pucuk kekuasaan lokal. Kebebasan dalam masyarakat ini dimanfaatkan dengan memetakan kekuatan dan membangun jaringan, dengan begitu dalil kebebasan dan pilihan masyarakat digunakan untuk melanggengkan masa jabatan elite-elite tertentu. Model seperti ini biasa disebut sebagai dinasti politik.

Dinasti politik menjadi masalah karena tidak ada perputaran kekuasaan secara ideal dalam pemerintahan suatu wilayah. Berdasarkan tulisan Karyudi Sutajah Putra dalam Suara Merdeka “Kompetisi Politik Dinasti”, dinasti politik merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai (Hidayati, n.d.). Dengan begitu dinasti politik juga merupakan indikator yang jelas untuk menilai bahwa rekrutmen politik yang terjadi dalam partai politik tidak berjalan dengan baik, karena kedekatan dan kekerabatan menjadi faktor penting dipilihnya kandidat tersebut. Kualitas menjadi tanda tanya besar bagi kandidat, ini bisa berakibat pada kurangnya legitimasi akademis pemimpin terpilih. Kebijakan yang dihasilkan juga bisa potensial bermasalah, karena hanya mewariskan program dan/atau kepentingan dari pemimpin terdahulunya. Kondisi yang tercipta di masyarakat menjadi cenderung tidak dinamis.

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan (Herna Susanti, 2017). Walaupun pada akhirnya pemimpin-pemimpin tersebut dipilih oleh suara dan kehendak dari rakyat, tetapi pemilihan dirinya untuk menjadi kandidat atau calon pemimpin tidak sepenuhnya demokratis. Faktor kedekatan dan kekerabatan bertindak seperti *barrier to entry* bagi kandidat lain yang tidak memiliki *privilege* serupa. Disinilah kemacetan yang potensial untuk mendegradasi nilai demokrasi. Tahapan yang sangat penting dalam sebuah proses kontestasi politik. Keadaan demikian cenderung menjadikan orientasi seorang pemimpin lebih kepada penguatan posisi dirinya sendiri dan kerabat dalam wilayah-wilayah tertentu, agar pengaruhnya tidak tergeser dan memudahkan ketika proses seleksi kandidat dilakukan partai politik.

Salah satu praktik dasar politik terjadi di sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten tersebut dipimpin oleh Tengku Zulkarnain atau yang lebih dikenal sebagai Ampo Bang. Pemerintahan dalam lingkaran Kabupaten Agam diisi oleh lingkaran kerabat dari Ampo Bang seperti Tengku syarizal atau Popon yang menjabat sebagai sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) yang merupakan anak. Selanjutnya ada Cut Intan Mala yang merupakan saudara dari Ampo Bang menjadi kepala dinas pendidikan, Tengku Jamalul Amaluddin menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan istri dari Ampo Bang, yaitu Kelimah menduduki jabatan sebagai ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya periode 2014-2019. Posisi kepala Bappeda Nagan Raya diisi juga oleh lingkungan keluarganya yaitu TR Keumangan. Kekuatan Ampo Bang tidak hanya berada pada level elitis Kabupaten Nagan Raya tetapi juga terbangun dengan rapi hingga pada tahap *grassroots* tentu dengan kekuatan yang sangat besar dari atas sampai ke bawah masyarakat menjadikan pemerintahan Ampo Bang sulit tersentuh kritik. Bahkan dalam masyarakat Nagan Raya dinasti politik yang dijalankan oleh Ampo Bang merupakan sebuah hal yang lumrah. Wajar jadinya jika Ampo Bang dapat bertahan dalam posisi di Kabupaten Nagan Raya selama dua periode berturut-turut.

Selanjutnya, dinasti politik juga terjadi di Kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh Aang Hamid Suganda. Dirinya pertama kali menjabat pada periode

tahun 2003 hingga 2008 ketika berpasangan dengan Aan Suharso. Setelah periode pertamanya selesai Aang Hamid Suganda kembali maju untuk menjadi calon Bupati Kuningan berpasangan dengan Momon Rochmana dan menang untuk periode 2008 hingga 2013. Setelah dua kali menjabat, Aang Suganda digantikan oleh istrinya, yaitu Hj. Utje Hamid Suganda yang berpasangan dengan Acep Purnama. Pada masa jabatan tersebut Utje Suganda hanya menjabat sampai tahun 2016 karena wafat pada tahun tersebut dan jabatannya dilanjutkan oleh Acep Purnama sampai tahun 2018. Setelah masa jabatannya habis Acep Purnama kembali maju berpasangan dengan M. Ridho Suganda sebagai wakil yang merupakan anak dari Aang Hamid Suganda. Dukungan tersebut datang dari salah satunya PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara dukungan partai terhadap Ridho dengan statusnya sebagai anak dari Aang Hamid Suganda dan Utje Hamid Suganda yang merupakan bupati sebelumnya.

Berikutnya juga salah satu fenomena dinasti politik yang menarik untuk dilihat lebih mendalam melalui penelitian ini adalah pada pemerintahan Kabupaten Sleman. Dinasti ini dimulai ketika Sri Purnomo terpilih pada tahun 2005 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sleman mendampingi Ibnu Subiyanto. Namun pada tahun terakhir Ibnu Subiyanto diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri karena terseret kasus korupsi dan setelahnya Sri Purnomo menggantikan jabatan Ibnu Subiyanto. Kekuasaan Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman berlanjut dua periode berturut-turut sampai pada tahun 2020. Setelah Sri Purnomo selesai dalam jabatannya Kustini Sri Purnomo yang merupakan istri Sri Purnomo mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Sleman selanjutnya. Kekuasaan keluarga Sri Purnomo dalam lingkup eksekutif di Kabupaten Sleman berlanjut sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.1 Masa jabatan dan perolehan dukungan Sri Purnomo dan Kustini Sri Purnomo

Penjabat	Wakil	Tahun	Partai
Ibnu Subiyanto	Sri Purnomo	2005-2009	194.464 suara (39,58%)
Sri Purnomo	-	2009-2010	

Sri Purnomo	Yuni Satia R	2010-2015	PDIP, PAN, Gerindra 35,2%
Sri Purnomo	Sri Muslimatun	2016-2020	PAN, Nasdem, Golkar, PKB, Partai Demokrat 297.267 suara (56,66%)
Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo	Danang Maharsa	2021-2024	PDIP, PAN 217.921 Suara (30,20%)

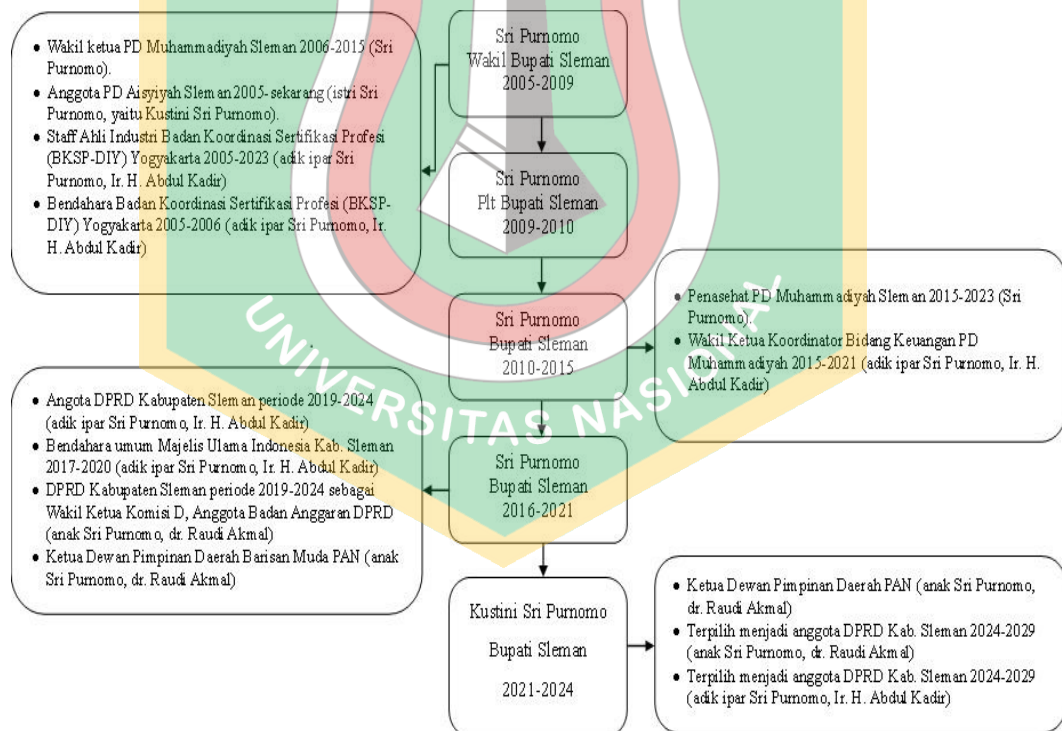
Selain kiprah politik yang dijalankan oleh Sri Purnomo dan Kustini Sri Purnomo sebagai bupati dan juga wakil bupati di Kabupaten Sleman terdapat juga keluarga lainnya. Ada dua anggota keluarga lain, yaitu Raudi Akmal yang merupakan anak dari Sri Purnomo dan Abdul Kadir yang merupakan kolega dari Kustini. Keduanya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman sejak periode 2019 dan kembali terpilih pada pemilu 2024.

Tabel 1.2 Masa jabatan dan perolehan dukungan keluarga Sri Purnomo

Nama	Lembaga	Partai	Perolehan suara /suara partai
dr. Raudi Akmal (anak Sri Purnomo)	DPRD Kabupaten Sleman <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Komisi D • Anggota Badan Anggaran DPRD 	Partai Amanat Nasional Dapil Sleman 1	10.381 / 11.793 (2024)

	Menjabat pada periode 2019-2024 dan 2024-2029		
Ir. H. Abdul Kadir (ipar Sri Purnomo)	DRPD Kabupaten Sleman	Partai Amanat Nasional Dapil Sleman 2	6.692 / 7.918 (2024)
	Menjabat pada periode 2019-2024 dan 2024-2029		

Gambar 1.1 Sebaran jabatan Dinasti Sri Purnomo



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Bahwa keluarga Sri Purnomo menaruh pengaruhnya dalam lembaga eksekutif legislatif partai politik dan organisasi sosial masyarakat mayoritas masyarakat Kabupaten Sleman. Sri

Purnomo melakukannya dengan bertahap sejak tahun 2005 pada saat dirinya menjabat sebagai wakil Bupati dan pada saat itu juga dirinya menjabat sebagai wakil ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan disaat yang bersamaan juga istrinya jadi anggota PD Aisyiyah Sleman sejak 2005 sampai saat ini. Keberadaan keluarga Sri Purnomo juga diperkuat kembali pada tahun 2015 ketika Sri Purnomo menjadi penasehat PD Muhammadiyah Sleman dan adik iparnya, Abdul Kadir menjadi wakil ketua koordinator bidang keuangan PD Muhammadiyah. Selanjutnya juga Sri Purnomo menguatkan posisinya di partai politik melalui Partai Amanat Nasional dengan masuknya Raudi Akmal menjadi ketua DPD Barisan Muda PAN Sleman dan berlanjut menjadi Ketua DPD PAN Sleman.

Dorso dalam *Regimes, Movement, and ideologies* (1978) yang dituliskan Leo Agustino, sirkulasi elite berproses seperti pertukaran (*exchange*) yang berlangsung dalam tiga mekanisme perubahan, yaitu:

- 1) Pertukaran atau sirkulasi elite antara pihak pemerintah dengan oposisi dari dalam klas-klas politik yang selama pemerintahan berlangsung menjalankan fungsinya sebagai pengawas berjalannya pemerintahan. Mekanisme ini bisa berlangsung dengan baik jika ada dua partai politik yang kuat posisinya.
- 2) Pertukaran yang terjadi antara elite dalam kelompok *political class* dengan kelompok yang pernah berkuasa atau sedang berkuasa. Sirkulasi tersebut membuka kesempatan pada seluruh pihak termasuk pada kelompok-kelompok baru, sehingga tidak tercipta *interlocking politics* dalam tubuh elit.
- 3) Pertukaran antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa, *the ruling class* dengan kelompok *the ruled class* (Agustino, 2020).

Mengutip dari Muhtar Haboddin bahwa Bottomore (2006) dalam tulisannya yang berjudul “Elite dan Masyarakat” menjelaskan bahwa Sirkulasi Elite merupakan proses perputaran individu antara elite dan non elite atau mengacu pada proses pergantian elite memerintah dengan elite yang tidak memerintah. Dalam analisa Bottomor ada dua catatan penting dalam hal sirkulasi elit, yaitu:

- 1) Sirkulasi elite terjadi diantara sesama elite dalam pemerintahan;
- 2) Sirkulasi elite juga bisa terjadi antara elite dan massa (Haboddin, 2020).

Pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Sleman kepemimpinan Sri Purnomo yang berasal dari tahun 2005 sampai saat ini membatalkan tiga mekanisme perubahan yang dirumuskan Dorso dan Bottomore. Karena pada dalil pertamanya Sri Purnomo mencegah pertukaran atau sirkulasi elite antara pihak pemerintah dengan posisi dari dalam kelas politik atau pihak oposisinya sejak tahun 2005. Selanjutnya juga Sri Purnomo memecah jalan bagi para pembaru yang ingin berkuasa di Kabupaten Sleman begitu juga pada pihak-pihak *the ruled class* yang pada akhirnya tidak bisa berada pada posisi *the ruling class* sebagai bukti dirinya mencalonkan istrinya yaitu Kustini Sri Purnomo dalam pilkada yang berlangsung tahun 2020. Hal yang menjadi bukti kepemimpinan Sri Purnomo menghambat sirkulasi adalah pengamanan posisi keluarga Sri Purnomo dalam partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional. Pada DPD Partai Amanat Nasional Rudi Akmal resmi menjabat sebagai ketua sejak tahun 2020 menggantikan Sadar Narimo dan beralih posisi yang sebelumnya adalah ketua DPD Barisan Muda PAN.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fenomena dinasti politik yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah dinasti politik yang dilakukan oleh Sri Purnomo di Kabupaten Sleman. Analisis permasalahan dalam penelitian ini berupa penjelasan deskriptif mengenai strategi yang digunakan oleh Sri Purnomo dalam upaya membangun dan mempertahankan dinasti politiknya di Kabupaten Sleman. Informasi dari hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum agar bisa menilai dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan kapabilitas kandidat, bukan hanya sekedar dengan alasan kedekatan, ketenaran, dan pengaruh sosial yang tinggi. Dengan begitu kontestasi politik bisa menjadi wadah untuk pendewasaan dan pendidikan sosial politik bagi masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dinasti politik membawa beberapa permasalahan dan yang paling krusial adalah mengenai terhambatnya sirkulasi elit. Hal tersebut tidak sejalan dengan sistem yang diterapkan, yaitu

demokrasi yang salah satu tujuannya untuk membatasi kuasa elit. Hambatan pada sirkulasi elite menjadi *barrier to entry* kandidat potensial lain yang tidak memiliki *privilege*. Langgengnya dinasti politik juga menandakan ada masalah dalam pendidikan politik dan rekrutmen yang seharusnya dilakukan partai politik. Produk kebijakan yang dibuat juga hanya dikuasai oleh kelompok kecil. Dampaknya adalah kebijakan dan pengembangan cenderung tidak eksploratif pada potensi lain yang dimiliki oleh daerah tersebut karena tidak sesuai dengan kebutuhan elite dalam dinasti tersebut.

Walaupun memiliki berbagai permasalahan yang ditimbulkan, dinasti politik masih berjalan diberbagai daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sleman. Sri Purnomo membangun dinastinya sejak menjadi wakil bupati pada 2005 dan bertahan sampai dengan 2024 dengan pengaruhnya di eksekutif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencari tahu lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh Sri Purnomo untuk dinastinya, sehingga menjadi sebuah pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

Apa strategi yang dilakukan oleh Sri Purnomo dalam membangun dan mempertahankan dinasti politik di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi yang digunakan oleh Sri Purnomo dalam membangun dinasti politik di Kabupaten Sleman.

1.4 Kegunaan penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dinasti politik, pemilihan kepala daerah, dan politik lokal. Secara lebih spesifik penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai salah satu dinasti politik yang terjadi di Indonesia, yaitu di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, kedepannya diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber data dan informasi yang bisa

melengkapi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan perbandingan dalam penelitian terutama yang membahas dinasti politik.

1.5 Sistematika penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menguraikan hasil studi literatur penelitian terdahulu yang orang lain lakukan dan relevan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk membandingkannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya bab ini juga membahas dan menguraikan teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian membahas mengenai pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.

BAB IV**GAMBARAN UMUM**

Bab Gambaran umum memberi penjelasan mengenai kondisi tempat penelitian secara keseluruhan.

BAB V**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai strategi Sri Purnomo dalam membangun dan mempertahankan dinasti politik di Kabupaten Sleman pada periode 2005-2024 dan membahas korelasi dinasti politik Sri Purnomo dengan teori modal sosial.

BAB VI**PENUTUP**

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian yang membahas strategi Bupati Sri Purnomo dalam membangun dan mempertahankan dinasti politik di Kabupaten Sleman periode 2005-2024.

